

**PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PENGAWASAN
KEUANGAN, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERHADAP NILAI INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH**

(Studi Empiris di SKPD Kota Padang Panjang)

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu



Oleh :

FADHILLA HUSNA

2008 / 05240

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PENGAWASAN
KEUANGAN, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERHADAP NILAI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
(Studi Empiris SKPD Kota Padang Panjang)**

Nama : FADHILLA HUSNA
BP/NIM : 2008/05240
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Mei 2013

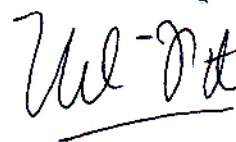
Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak.
NIP. 19580519 199001 1 001

Pembimbing II



Nelvirita, SE, M.Si, Ak.
NIP. 19740706 199903 2 002

Diketahui Oleh:
Ketua Prodi Akuntansi

Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak.
NIP. 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang

PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA, PENGAWASAN KEUANGAN, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP NILAI INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

(Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kota Padang Panjang)

Nama : FADHILLA HUSNA

NIM/BP : 2008/05240

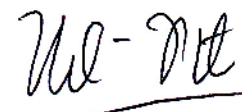
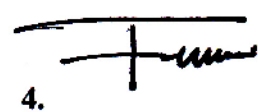
Program Studi : Akuntansi

Keahlian : Sektor Publik

Fakultas : Ekonomi

Padang, Mei 2013

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Ketua : Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak	1. 
2. Sekretaris : Nerverita, SE.M.Si.Ak	2. 
3. Anggota : Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak	3. 
4. Anggota : Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	4. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fadhilla Husna
NIM/Thn. Masuk : 05240/2008
Tempat/Tgl. Lahir : Padang Panjang/ 04 Maret 1991
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jalan. M.Yamin Dalam No.26 Pasar Usang, Padang Panjang
No. HP/Telepon : 085272226611
Judul Skripsi : Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pengawasan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kota Padang Panjang).

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis atau skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana), baik di UNP maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani Asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima Sanksi Akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang 2011
Yang menyatakan,

Fadhilla Husna
NIM. 05240

ABSTRAK

Fadhilla Husna : Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengawasan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris SKPD Kota Padang Panjang)

**Pembimbing : 1. Dr. H. Efrizal Syofyan SE, M.Si, Ak
2. Nelvirita SE, M.Si, Ak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris : 1) Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan, 2) Pengaruh Pengawasan Keuangan terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan, dan 3) Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD di kota Padang Panjang yang berjumlah 27 SKPD, penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel secara *Total Sampling*, dalam hal ini Responden penelitian adalah kepala bagian dan staf bagian Akuntansi/ penatausahaan keuangan SKPD. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Data dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden yang bersangkutan. Teknik analisis data menggunakan regresi berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Kualitas SDM tidak berpengaruh terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan dengan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1.358 < 2.0129$), dan nilai signifikansi $0.180 > 0.05$ dan nilai β arahnya positif yaitu sebesar 0,140 (H_1 ditolak). (2) Pengawasan Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu $5.275 > 2.0129$, dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan nilai β arahnya positif yaitu sebesar 0,608 (H_2 diterima), (3) Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2.943 > 2.0129$) dan nilai signifikansi $0.005 < 0.05$ dan nilai β arahnya positif yaitu sebesar 0,299 (H_3 diterima).

Dalam penelitian ini disarankan: 1) Bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah lebih meningkatkan mutu dari kualitas sumber daya manusia terutama dalam bidang akuntansi dan menempatkan pegawai sesuai dengan kualifikasi dan kemampuan yang dimiliki. Mengadakan pelatihan pegawai untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaporan keuangan. 2) Untuk peneliti berikutnya supaya menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik survei dan wawancara langsung terhadap responden untuk dapat menggali semua hal yang menjadi tujuan penelitian, dan penggantian sampel penelitian, serta dilakukan perubahan dalam pemilihan alternatif jawaban pada kuesioner penelitian.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengawasan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Nilai Inforamsi Pelaporan Keuangan Pemerintah”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan dan rintangan yang penulis hadapi. Namun demikian, atas bimbingan, bantuan, dan arahan, serta dukungan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih kepada bapak Dr.H. Efrizal Syofyan SE, M.Si, Ak dan Ibu Nelvirita, SE, M.Si, Ak selaku dosen pembimbing yang telah banyak menyediakan waktu dan pemikirannya dalam penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

3. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, khususnya Program Studi Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.
4. Bapak dan Ibu Kepala Bagian pada masing-masing SKPD di Lingkungan Pemko Padang yang telah membantu penulis dengan memberikan data penelitian.
5. Orangtua, kakak dan seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan perhatian, kasih sayang, do'a tulus ikhlas serta dukungan penuh kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman di Fakultas Ekonomi yang banyak memberikan saran, bantuan dan dorongan dalam penyusunan skripsi ini, terutama teman-teman Program Studi Akuntansi Angkatan 2008.
7. Dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis tetap berusaha untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, April 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Pembatasan Masalah	11
D. Perumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	12
F. Manfaat Penelitian	12
BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL	
DAN HIPOTESIS	14
A. Kajian Teori	14
1. Nilai Informasi Pelaporan Keuangan	12
2. Kualitas Sumber Daya Manusia.....	28
3. Pengawasan Keuangan Daerah	31
4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah..	39
B. Penelitian Terdahulu	44
C. Kerangka Konseptual	47
D. Hipotesis	51

BAB III. METODE PENELITIAN	52
A. Jenis Penelitian	52
B. Tempat Penelitian.....	52
C. Populasi, Sampel dan Responden	52
D. Jenis dan Sumber Data	55
E. Metode Pengumpulan Data	56
F. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel.....	56
G. Instrumen Penelitian	58
H. Uji Validitas dan Uji Realibilitas	59
I. Hasil Uji Coba Instrumen	61
J. Uji Asumsi Klasik	62
K. Teknik Analisis Data	64
L. Definisi Operasional.....	69
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	71
A. Sampel dan Responden Penelitian	71
B. Analisis Deskriptif.....	72
C. Deskripsi Hasil Penelitian	75
D. Uji Validitas Dan Reabilitas	81
E. Uji Asumsi Klasik	83
F. Hasil Analisis Data.....	87
G. Pembahasan	92

BAB V. PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Keterbatasan Penelitian	100
C. Saran Penelitian.....	100
DAFTAR PUSTAKA.	102
LAMPIRAN.....	105

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Nama SPKD Pemerintah Kota Padang Panjang.....	54
2. Kisi-kisi instrumen penelitian	58
3. Hasil uji coba instrumen	62
4. Tingkat pengembalian kuesioner	71
5. Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan.....	72
6. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	73
7. Karakteristik Responden Berdasarkan masa Kerja	74
8. Distribusi Frekuensi Variabel Nilai Informasi Pelaporan Keuangan.....	75
9. Distribusi frekuensi variabel Kualitas Sumber Daya Manusia	77
10. Distribusi Frekuensi Variabel Pengawasan Keuangan Daerah.....	78
11. Distribusi frekuensi variabel sistem pengendalian intern pemerintah	80
12. Nilai <i>corrected item-total correlation</i> terkecil	82
13. Nilai <i>cronbach's alpha</i>	83
14. Uji normalitas residual	84
15. Uji multikolinearitas	85
16. Uji heteroskedastisitas	87
17. Uji Koefisien Determinan	87
18. Koefisien regresi berganda	88
19. Uji F	90

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government governance*), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2002).

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip yang disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan

Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Governmental Accounting Standard Board (1999) dalam *Concepts Statement* No. 1 tentang *Objectives of Financial Reporting* menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Harus disadari bahwa ada banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Mardiasmo (2002:168) mengidentifikasi sepuluh pemakai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yaitu: (1) pembayar pajak (*tax payer*), (2) pemberi dana bantuan (*grantors*), (3) investor, (4) pengguna jasa, (5) karyawan atau pegawai, (6) pemasok (*vendors*), (7) dewan legislatif, (8) manajemen, (9) pemilih (*voters*), (10) badan pengawas. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai.

Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai (Suwardjono, 2005:165). Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan andal. Oleh

karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 antara lain: (1) relevan, (2) andal, (3) dapat dibandingkan, dan (4) dapat dipahami.

Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Ketua BPK RI Anwar Nasution menilai laporan keuangan pemerintah masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai dan mengakibatkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tidak layak audit. Permasalahan yang ditemukan diantaranya terkait sangat rendahnya akuntabilitas dan transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,

ketidakjelasan penyimpanan dana daerah dan penggunaan keuangan daerah yang tidak jelas keperluannya. (Media Indonesia, 2006).

Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Menurut Wiley (2002) dalam Zetra (2009) mendefinisikan bahwa “Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut”. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Menurut Wahyono (2004:12) informasi harus andal sebagai salah satu indikator berkualitasnya suatu informasi. Keterandalan disini menyangkut sumber daya manusia yang menghasilkannya. Sumber daya manusia pengguna sistem dituntut untuk memiliki tingkat keahlian akuntansi yang memadai atau paling tidak memiliki kemauan untuk terus belajar dan mengasah kemampuan di bidang akuntansi. Disini kemampuan sumber daya manusia itu sendiri sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang bernilai (andal).

Penelitian mengenai sumber daya manusia yang ada di instansi pemerintah pernah dilakukan. Penelitian Dinata (2004) menemukan bukti empiris bahwa secara garis besar sumber daya manusia yang ada di instansi pemerintahan Kota Palembang belum sepenuhnya dinyatakan siap atas berlakunya Sistem Akuntansi

Keuangan Daerah yang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 (Dinata, 2004). Penelitian Alimbudiono dan Fidelis (2004) memberikan temuan empiris bahwa pegawai berlatar pendidikan akuntansi di subbagian akuntansi Pemerintah XYZ masih minim, *job description*-nya belum jelas, dan pelatihan-pelatihan untuk menjamin fungsi akuntansi berjalan dengan baik belum dilaksanakan.

Pada hasil penelitian-penelitian tersebut didapatkan temuan yang menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia yang ada di instansi pemerintahan yang diteliti belum memadai. Kualitas sumber daya manusia yang masih minim ini mungkin memiliki pengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah.

Hal kedua yang mungkin memiliki pengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah pengawasan keuangan daerah. Sistem akan berjalan baik apabila ada pengawasan yang memastikan sistem berjalan sesuai dengan rencana, untuk mendukung kualitas laporan keuangan yang bermutu. Maka oleh sebab itu perlu adanya pengawasan dalam pengelolaan anggaran daerah, agar semua proses berjalan dengan baik sehingga dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang bermutu.

Untuk menyajikan informasi keuangan yang handal kepada para pemakai agar sesuai dengan yang ditetapkan, diperlukan media tertentu yang dipandang relevan, yaitu pengawasan keuangan daerah (Tuasikal, 2007). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011, yang dimaksud

dengan pengawasan adalah proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terhadap sistem pengendalian intern diarahkan antara lain untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektifitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Untuk mewujudkan integrasi kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, maka pembinaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah harus dilakukan secara terus menerus (*series of actions and on going basis*). Disamping itu, diperlakukan perubahan pola pikir (*mind set*) Aparat Pengawas Intern Pemerintah sebagai pemberi peringatan dini (*early warning*) terhadap temuan pelanggaran atau penyimpangan yang berindikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Fungsi pengawasan adalah pengambilan tindakan korektif, yaitu apabila ditemukan adanya penyimpangan, kekeliruan, serta pemborosan dapat segera diperbaiki, sehingga informasi keuangan yang dihasilkan menjadi valid dan relevan. Pengawasan merupakan upaya untuk mengenali penyimpangan atau hambatan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Bila ternyata kemudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan, diharapkan akan dapat segera dideteksi atau diambil tindakan koreksi, sehingga informasi keuangan dapat segera digunakan oleh pemakai, dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat berjalan secara maksimal. Dari hasil penelitian Galuh (2012) ditemukan masih lemahnya pengawasan dan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Hal ketiga yang mungkin mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah sistem pengendalian intern. Sistem akuntansi memerlukan pengendalian intern atau dengan kata lain sistem akuntansi berkaitan erat dengan pengendalian intern organisasi (Mahmudi, 2007). Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta melindungi sumber daya organisasi. Salah satu tujuan umum manajemen dalam merancang sistem pengendalian intern yang efektif adalah agar pelaporan keuangan reliable (Arens, 2008:370).

Untuk mencapai informasi yang akurat diperlukan komponen pengendalian sesuai yang ditegaskan gubernur Sumatera Barat berkaitan dengan pelaporan keuangan pemerintah dan penggunaan informasi dalam menghasilkan opini auditor. Menurut Fauzi (2008:15)

“... ada empat hal yang dapat mempengaruhi opini auditor atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), penerapan pengendalian intern yang memadai, ketaatan terhadap peraturan dan pengungkapan yang lengkap...”

Pengendalian intern menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Ada tiga fungsi yang terlihat dari definisi tersebut yaitu: (a) keterandalan pelaporan keuangan, (b) efisiensi dan efektivitas operasi, dan (c) kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Ria Setiawan (dalam Indriasari, *et al.* 2008) sistem akuntansi sebagai

sistem informasi merupakan subjek terjadinya kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja .

Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang diterapkan untuk mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan laporan keuangan yang handal serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK, salah satu masalah yang perlu diperhatikan adalah tentang Sistem Pengendalian Intern (SPI). BPK menghimbau agar temuan tentang Sistem Pengendalian Intern dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjadi perhatian bersama, sehingga dapat mencapai efisiensi, efektifitas, dan mencegah terjadinya kerugian keuangan Negara demi kepentingan masyarakat dan daerah.

Salah satu cara bagaimana melihat apakah laporan keuangan yang telah disusun telah sesuai standar akuntansi pemerintah dan telah sesuai dengan kualitas yang diharapkan, dapat dilihat dari opini auditor. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2010 Kota Padang Panjang, BPK RI perwakilan Sumatera Barat memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) di bidang aset, itu berarti tidak ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2011 opini audit LKPD kota Padang Panjang tetap Wajar Dengan Pengecualian (WDP). “Dalam rangka peningkatan opini pada Pemerintah daerah, seharusnya masing-masing Pemda memperkaya SDM yang telah mengerti tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), sehingga tidak terjadi pelaksanaanya bagus sedangkan penyajiannya kurang bermutu” ujar L. Swandi Sitanggang. Keterangan tersebut

diberikan masih terhadap asset yang juga terjadi semenjak tahun 2009. BPK berharap setiap Pemerintah Daerah dapat menjadikan LHP yang telah diserahkan BPK sebagai pedoman untuk perbaikan kinerja Pemerintah Daerah dimasa yang akan datang (<http://padang.bpk.go.id/>).

Berdasarkan fenomena tersebut dapat dinyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah masih belum sepenuhnya memenuhi kriteria nilai informasi pelaporan keuangan yaitunya keterandalan. Mengingat bahwa keterandalan merupakan unsur nilai informasi yang penting terkait dengan akuntabilitas dan transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Di dalam Konsep Standar Pemeriksaan Keuangan Negara pada bab Standar Pekerjaan Lapangan Pemeriksaan Keuangan mengenai Pengendalian Intern disebutkan bahwa sistem informasi yang relevan dengan tujuan laporan keuangan, salah satunya adalah sistem akuntansi yang terdiri dari metoda dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, mengikhtisarkan, dan melaporkan transaksi entitas (baik peristiwa maupun kondisi) untuk memelihara akuntabilitas bagi aktiva, utang, dan ekuitas yang bersangkutan (BPK RI, 2010).

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah pernah dilakukan, diantaranya dilakukan oleh Indriasari (2008), yang menemukan bukti empiris bahwa sumber daya manusia di sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan yang ada di Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir diakui masih sangat kurang dari sisi jumlah maupun kualifikasinya. Dari sisi jumlah, beberapa satuan kerja yang ada hanya memiliki satu pegawai akuntansi, yaitu kepala sub bagian akuntansi/tata usaha

keuangan. Sedangkan dari sisi kualifikasinya, sebagian besar pegawai sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Uraian tugas dan fungsi sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan yang ada juga masih terlalu umum (belum terspesifikasi dengan jelas).

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Winidyaningrum (2010), yang memberikan temuan empiris bahwa sumber daya manusia di sub bagian/tata usaha keuangan yang ada di Pemerintah Daerah SUBOSUKAWONOSRATEN (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten) sudah mencukupi, baik dari sisi jumlah maupun kualifikasinya. Dari sisi jumlah, beberapa satuan kerja yang ada memiliki beberapa pegawai akuntansi. Dari sisi kualifikasi, sebagian besar pegawai sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Uraian tugas dan fungsi sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan yang ada sudah terspesifikasi dengan jelas.

Perbedaan hasil kedua penelitian inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, dengan berfokus pada satu nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah saja yaitu keandalan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kualitas sumber daya manusia, pengawasan keuangan, dan pengendalian intern akuntansi serta pengaruhnya terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah dengan judul: **“Pengaruh Kualitas Sumber**

Daya Manusia, Pengawasan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas masalah yang dapat diidentifikasi adalah;

1. Sejauhmana penyusunan laporan keuangan pada Pemerintah Kota Padang Panjang?
2. Seberapa besar pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap nilai pelaporan keuangan pemerintah Kota Padang Panjang?
3. Seberapa besar pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang?
4. Seberapa besar pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan Pemerintah Kota Padang panjang?

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas, yaitu kualitas sumber daya manusia, pengawasan keuangan daerah dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Sejauhmana kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah?
2. Sejauhmana pengawasan keuangan berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah?
3. Sejauhmana sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris :

1. Pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada instansi pemerintah di Kota Padang Panjang.
2. Pengaruh pengawasan keuangan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada instansi pemerintah di Kota Padang Panjang.
3. Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada instansi pemerintah Kota Padang Panjang.

F. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat kepada :

1. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai pelaporan keuangan pemerintahan.
2. Bagi dunia pendidikan akuntansi, dapat menjadi bahan masukan dan referensi dalam bidang akuntansi pemerintahan.

3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan referensi yang akan mengadakan kajian lebih luas dalam bahasan ini.
4. Hasil ini dapat diharapkan bisa dijadikan dasar atau acuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Dengan memperhatikan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki baik pada tingkatan sistem, kelembagaan, maupun individu, didukung dengan pengawasan keuangan yang seoptimal mungkin, dan adanya rancangan sistem pengendalian daerah yang memadai bagi pihak pengelola keuangan daerah khususnya bagian akuntansi.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. KAJIAN TEORI

1. Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

a. Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pelaporan keuangan adalah struktur dan proses akuntansi yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan ekonomik dan sosial negara (Suwardjono, 2005). Laporan Keuangan merupakan bentuk pertanggung jawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan Keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain.

Dalam Standar Akuntansi pemerintah (SAP) (2005:56) tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Laporan keuangan pada dasarnya merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kepada pihak lain, yaitu

para pemangku kepentingan (*stake holder*), tentang kondisi keuangan pemerintah. Di Indonesia, laporan keuangan pokok yang harus dibuat oleh pemerintah sebagai tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan meliputi :1) Laporan Realisasi Anggaran, 2) Neraca, 3) Laporan Arus Kas, dan 4) Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan (PP No. 24 Tahun 2005) :

1) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas

pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4) Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Menurut Anggraini (2002) dalam Harifan (2009) apabila aktivitas dana suatu pemerintah untuk suatu periode pelaporan telah dicatat, maka data perlu diikhtisarkan untuk tujuan :

- 1) Pelaporan bahwa aktifitas telah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.
- 2) Pelaporan posisi keuangan kesatuan pemerintah pada akhir periode pelaporan.
- 3) Pelaporan perubahan (misalnya penghasilan dan pengeluaran) sumber yang digunakan.

Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan daerah pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota terdiri dari (Taufik dalam Harfan 2009) :

1. Pendahuluan

Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum dalam rangka

meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

2. Peranan dan tujuan pelaporan keuangan

a) Peranan pelaporan keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah selama satu periode laporan.

b) Tujuan Pelaporan keuangan

- 1) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- 2) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- 3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- 4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- 5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya,

baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.

- 6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

c) Dasar hukum pelaporan keuangan

Menurut Mardiasmo (2002) tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan dan Pengelolaan (*Compliance and Stewardship*)

Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.

- 2) Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (*Accountability and Retrospective Reporting*).

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

- 3) Perencanaan dan Informasi Otorisasi (*Planning and Authorization Information*)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang. Laporan

keuangan berfungsi untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.

4) Kelangsungan Organisasi (*Viability*)

Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pengguna dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang.

5) Hubungan Masyarakat (*Public Relation*)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pengguna yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

6) Sumber Fakta dan Gambaran (*Source of Facts and Figures*)

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah selama satu periode laporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi

efektivitas dan efisiensi, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan pemerintah daerah menyajiakan informasi bagi para pengguna laporan keuangan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh berbagai pihak. Pihak yang terlibat dan berkepentingan terhadap Pemerintah daerah baik itu langsung maupun tidak langsung yang disebut sebagai pemakai laporan keuangan daerah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pengawas Keuangan, rakyat, pemerintah pusat, dan donatur.

b. Nilai Informasi

Menurut Suwardjono (2005) nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan. Agar manfaat dan tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah dapat dipenuhi maka informasi yang disajikan harus merupakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Informasi akan bermanfaat kalau informasi dapat dipahami dan digunakan oleh para pemakai, serta informasi juga bermanfaat kalau pemakai mempercayai informasi tersebut. Menurut Wahyono (2004) dalam menghasilkan suatu nilai informasi yang bernilai disini menyangkut dua elemen pokok, yaitu informasi yang dihasilkan dan sumber daya yang menghasilkan. Menyangkut informasi yang dihasilkan, maka informasi laporan keuangan tersebut harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak

terlalu rumit bagi pemakai dan bernilai, dengan tidak menggunakan istilah-istilah yang kabur serta menggunakan klasifikasi peraturan yang lazim atau berlaku.

Menurut Suwardjono (2005), suatu informasi dikatakan mempunyai nilai bila dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pemakainya. Kebermanfaatan ini merupakan suatu karakteristik yang hanya dapat ditentukan secara kualitatif dalam hubungannya dengan keputusan, pemakai, dan keyakinan pemakai terhadap informasi. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005) antara lain :

1) Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan, apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan:

a) Memiliki manfaat umpan balik (*Feedback Value*).

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi di masa lalu.

b) Memiliki manfaat prediktif (*Predictive Value*).

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c) Tepat Waktu.

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d) Lengkap.

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi dapat dicegah.

2) Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

a) Penyajian Jujur.

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b) Dapat Diverifikasi (*Veriability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c) Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

Sebagai aspek pendukung keberpautan, Keandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Informasi yang memiliki kualitas andal adalah apabila informasi tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

Dalam hal tertentu, mengejar keberpautan dan ketepatanwaktuan untuk mencapai kebermanfaatan harus dibarengi dengan mengorbankan kualitas lain yaitu keakuratan/presisi (*accuracy/precision*) atau keterandalan. Jadi terdapat saling korban (*trade-off*) antara ketepatanwaktuan dan keterandalan/reliabilitas untuk mendapatkan kebermanfaatan. Namun, walaupun berkurangnya reliabilitas berakibat berkurangnya kebermanfaatan, dimungkinkan untuk mempercepat ketersediaan data secara aproksimasi tanpa mempengaruhi reliabilitas

secara material. Dengan begitu ketepatanwaktuan dengan aproksimasi justru akan meningkatkan kebermanfaatan secara keseluruhan (Suwardjono, 2005).

3) Dapat Dibandingkan.

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4) Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Suatu informasi harus bermanfaat bagi para pemakai, sama saja dengan mengatakan bahwa informasi harus mempunyai nilai. Unsur-unsur

pembentukan kualitas informasi menurut suwardjono (2005) adalah sebagai berikut:

1) Keterpahaman.

Keterpahaman adalah kemampuan informasi untuk dapat dicerna maknanya oleh pemakai.

2) Keberpautan.

Keberpautan atau kerelevanan adalah kemampuan informasi untuk membantu pemakai dalam membedakan beberapa alternatif keputusan sehingga pemakai dapat dengan mudah menentukan pilihan.

3) Nilai Prediktif.

Sebagai unsur keberpautan, nilai prediktif adalah kemampuan informasi untuk membantu pemakai dalam peningkatan probabilitas bahwa harapan-harapan pemakai akan memunculkan suatu kejadian masa lalu atau yang akan terjadi. Nilai prediksi disini adalah jenis dan sifat informasi yang menjadi masukan dalam proses prediktif.

4) Nilai Balikan.

Nilai Balikan adalah kemampuan informasi untuk dijadikan basis mengevaluasi apakah keputusan-keputusan masa lalu adalah tepat dengan datangnya informasi tersebut.

5) Ketepatanwaktuan.

Ketepatanwaktuan adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan.

6) Keterandalan.

Keterandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Informasi akan menjadi berkurang nilainya kalau orang yang menggunakan informasi meragukan kebenaran atau validitas informasi tersebut.

7) Ketepatan Penyimbolan.

Ketepatan penyimbolan adalah kesesuaian atau kecocokan antara pengukur atau deskripsi (representasi) dan fenomena yang diukur atau dideskripsikan. Dalam akuntansi, fenomena yang ingin direpresentasikan adalah kondisi fisis, kondisi keuangan, dan kegiatan ekonomik badan usaha berupa sumber ekonomik, kewajiban keuangan, dan transaksi atau kejadian yang mengubah sumber ekonomik dan kewajiban tersebut.

8) Keterujian.

Keterujian adalah kemampuan informasi untuk memberikan keyakinan yang tinggi kepada para pemakai karena tersedianya sarana bagi para pemakai untuk menguji secara independen ketepatan penyimbolan (kebenaran/validitas informasi). Dengan kata lain pengukuran yang dipilih telah diaplikasikan tanpa kesalahan atau bias.

9) Kenetralan.

Kenetralan adalah ketidak berpihakan pada grup tertentu atau ketidakbiasan dalam perlakuan akuntansi. Ketidakberbiasan berarti bahwa informasi disajikan tidak untuk mengarahkan grup tertentu agar bertindak sesuai dengan keinginan penyedia informasi.

10) Keterbandingan.

Keterbandingan adalah kemampuan informasi untuk membantu pemakai mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara dua perangkat fenomena ekonomik.

11) Materialitas

Materialitas adalah besar kecilnya atau penghilangan atau penyalahsajian informasi akuntansi yang menjadikan besar kemungkinan bahwa pertimbangan seseorang bijaksana yang mengandalkan diri pada informasi tersebut berudah atau terpengaruh oleh penghilangan/pengabaian atau penyalahsajian.

Wahyono (2004:12) kriteria lain nilai informasi adalah akurat (*accurate*) dan andal. Untuk mencapai informasi akurat diperlukan komponen pengendalian / kontrol. Komponen kontrol atau pengendalian akan menjaga sistem informasi dari kesalahan-kesalahan yang disengaja atau tidak. Dengan adanya komponen kontrol dapat menunjang sistem informasi menghasilkan informasi yang bernilai. Sedangkan menurut Arens dalam Amir (1996:258), manajemen mempunyai kewajiban dan kepentingan untuk melaksanakan pengendalian intern dalam hal menyiapkan laporan keuangan. Manajemen mempunyai kewajiban hukum dan profesional untuk menjamin bahwa informasi telah disiapkan sesuai standar pelaporan, misalnya prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Menurut Suwardjono (2005:167) informasi dikatakan mempunyai nilai apabila informasi tersebut:

- 1) Menambah pengetahuan pembuat keputusan tentang keputusannya di masa lalu, sekarang, atau masa datang.
- 2) Menambah keyakinan para pemakai mengenai probabilitas terealisasinya suatu harapan dalam kondisi ketidakpastian.
- 3) Mengubah keputusan atau perilaku para pemakai.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Menurut Tjiptoherijanto (2001) dalam Alimbudiono & Fidelis (2004), untuk menilai kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumberdaya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumberdaya tersebut tidak dapat melaksanakan

tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.

Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Hevesi, 2005). Menurut beberapa pakar, kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup akan bekerja tersendat-sendat dan juga mengakibatkan pemborosan bahan, waktu, dan tenaga.

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

Ukuran kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari rata-rata pendidikan, pelatihan dan tingkat pengalaman (Griffin, 2004) yaitu:

1) Pendidikan

Pendidikan adalah suatu kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia, karena dimanapun dan kapan pun didunia terdapat pendidikan. Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk membudayakan manusia itu sendiri. Pendidikan dapat dibagi menjadi: (a) pendidikan formal, (b) pendidikan informal, (c) pendidikan nonformal.

2) Pelatihan

Menurut Rivai (2005), pelatihan adalah proses sistematis mengubah tingkah laku seseorang untuk mencapai tujuan organisasi. Pelatihan berkaitan dengan keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan. Pelatihan dapat mengajarkan keahlian yang diperlukan baik untuk pekerjaan saat ini maupun masa yang akan datang. Menurut Kendall (2003) dalam Wahyuni (2011), ada beberapa indikator pelatihan, yaitu: a) menetapkan sasaran yang jelas dan terukur, b) menggunakan metode pelatihan yang tepat, c) mempersiapkan materi pelatihan yang mudah dipahami, d) pelatihan memberikan keuntungan, e) pelatihan diberikan oleh tenaga ahli, f) materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pemakai, g) materi pelatihan disiapkan dengan baik.

3) Pengalaman

Pengalaman dapat dilihat dari lamanya seseorang bekerja. Dengan memiliki pengalaman seseorang akan terbiasa melakukan sesuatu

pekerjaan, lebih terampil, punya wawasan yang luas dan mudah beradaptasi dengan lingkungan. Pengalaman tidak hanya diukur dari tingkat pendidikan saja, pengalaman juga memberikan kontribusi yang cukup terhadap kemampuan seseorang dalam menangani sebuah pekerjaan. Menurut Desseler (2003, 135-136), pengalaman dibutuhkan untuk menentukan spesifikasi dan prestasi pekerjaan.

3. Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan menurut peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2005 tentang pedoman dan pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Pasal 1 (satu) menyebutkan, bahwa pengawasan pemerintah adalah proses kegiatan yang ditunjukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Yosa (2010) yang dimaksud dengan pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber data organisasi atau pemerintahan telah digunakan secara efektif dan efisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintahan.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu

melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahwa, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penetapan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan, sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan, dan dan samapi sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan ekstern (*external control*).

Jenis-jenis pengawasan dapat dibedakan berdasarkan objek, sifat, ruang lingkup, dan metode pengawasannya. (Baswir,2000)

- 1) Pengawasan berdasarkan objek
 - a) Pengawasan terhadap penerimaan Negara
 - b) Pengawasan terhadap pengeluaran Negara
- 2) Pengawasan berdasarkan sifatnya
 - a) Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dimulainya pelaksanaan suatu kegiatan, atau sebelum terjadinya pengeluaran keuangan. Pengawasan preventif pada dasarnya dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan.

b) Pengawasan detektif adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban bendaharawan. Pengawasan detektif biasanya dilaksanakan setelah dilakukannya tindakan yaitu dengan membandingkan antara hal yang telah terjadi dengan hal yang seharusnya terjadi.

3) Pengawasan menurut ruang lingkupnya

a) Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang berasal dari lingkungan internal organisasi pemerintah. Tujuan pengawasan ini tidak hanya melakukan verifikasi, melainkan juga dimaksudkan untuk membantu pihak yang diawasi dalam menunaikan tugasnya secara lebih baik.

b) Pengawasan eksternal adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawasan yang sama sekali berasal dari luar lingkungan organisasi eksekutif. Dengan demikian, dalam pengawasan eksternal ini, antara pengawas dengan pihak yang diawasi tidak lagi terdapat hubungan kedinasan.

4) Pengawasan menurut metode pengawasannya

a) Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu organisasi atau unit kerja terhadap bawahan.

- b) Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik yang berasal dari lingkungan internal pemerintah maupun yang berasal dari lingkungan eksternal pemerintah.

Adapun jenis-jenis pengawasan yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain sebagai berikut:

- a) Pengawasan intern, adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada didalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan intern dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*built in control*), atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh Inspektorat Jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri.
- b) Pengawasan Ekstern, adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini, di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam tugasnya, BPK tidak mengabaikan hasil laporan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah.
- c) Pengawasan Preventif, adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah

terjadinya penyimpangan. Pengawasan preventif ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan daerah yang akan membebankan dan merugikan daerah lebih besar. Pengawasan preventif akan bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinandilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal.

- d) Pengawasan Represif, adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Pengawasan ini umumnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, dimana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan dan pengawasan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 yang direvisi menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2009 tentang pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang termasuk dalam ruang lingkup pengawasan pengelolaan keuangan daerah ialah:

1. Pengaturan dan penetapan
2. Perencanaan dan penganggaran
3. Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah
4. Pertanggungjawaban keuangan daerah
5. Pendapatan dan belanja daerah

Yani (2002), ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah yang menjadi perhatian untuk pengawasan dalam pelaksanaannya:

1. Asas umum pengelolaan keuangan daerah
2. Pejabat2 yang mengelola keu daerah
3. Struktur APBD
4. Penyusunan RKPD, KUA, dan RKA- skpd
5. Penyusunan dan penetapan APBD
6. Pelaksanaan dan perubahan APBD
7. Penatausahaan keuangan daerah
8. Pertanggungjawaban pengelolaan APBD
9. Pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD
10. Pengelaloan kas umum negara
11. Pengelolaan piutang daerah
12. Pengelolaan investasi daerah
13. Pengelolaan barang milik negara
14. Pengelolaan cadangan
15. Pengelolaan utang daerah
16. Pembinaan pengelolaan keuangan daerah
17. Penyelesaian kerugian daerah
18. Pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, pengaturan pengelolaan keuangan daerah.

4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

a. Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 mengatur tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian intern pemerintah adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengendalian intern adalah suatu sistem pengendalian yang meliputi struktur organisasi beserta semua metode dan ukuran yang diterapkan dalam perusahaan. Pengendalian intern menurut Widjajanto(2001:18) adalah sebagai berikut:

“pengendalian yang diterapkan dalam perusahaan atau organisasi bertujuan untuk:1) mengamankan aktiva perusahaan,2) mengecek kecermatan dan ketelitian data akuntansi,3)meningkatkan efisiensi, dan 4)mendorong agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh segenap jajaran organisasi.

b. Unsur Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Menurut Arens (2008:375) internal control yang dikeluarkan *Commintee of Spoonsoring Organization* (COSO), yaitu kerangka kerja pengendalian internal yang paling luas diterima di Amerika Aerikat, menguraikan lima komponen pengendalian internal yang dirancang untuk mengimplementasikan oleh manajemen untuk memberikan kepastian yang layak bahwa tujuan pengendaliannya akan tercapai. Komponen pengendalian internal COSO,sama dengan yang ada dalam pasal 3 PP No. 60 tahun 2008 disebutkan bahwa SPIP meliputi hal-hal berikut :

1) Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan unsur penting karena membentuk budaya dan perilaku manusia.Unsur manusia merupakan penggerak dan menjadi landasan dalam segala aktivitas. Pimpinan dan segenap pegawai di Inspektorat wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui penegakan integritas dan nilai etika; komitmen terhadap kompetensi; kepemimpinan yang kondusif; pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2) Penilaian Resiko

Penilaian risiko terkait dengan kemampuan mengidentifikasi serta mengukur besaran risiko dalam pencapaian tujuan Inspektorat. Di dalam lingkungan pengendalian yang baik, kemampuan untuk menilai risiko juga akan baik. Inspektorat wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko terdiri identifikasi risiko dan analisis risiko. Dalam rangka penilaian risiko pimpinan di Inspektorat menetapkan tujuan pada tingkatan organisasi dan tujuan pada tingkatan kegiatan.

3) Kegiatan/aktivitas pengendalian;

Kegiatan pengendalian terkait dengan kemampuan untuk memilih jenis pengendalian yang tepat yang dipengaruhi oleh ketepatan dalam menilai risiko. Inspektorat wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Inspektorat. Kegiatan pengendalian terdiri atas reviu kinerja; pembinaan sumber daya manusia; pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; pengendalian fisik atas aset; penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja; pemisahan fungsi; otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

4) Informasi dan komunikasi;

Unsur-unsur pengendalian yang lain akan mudah direalisasikan jika terdapat sistem informasi dan komunikasi yang baik. Sistem informasi dan komunikasi dikatakan baik jika setiap pegawai di Inspektorat mendapat pesan yang jelas tentang apa yang harus dilakukan agar keseluruhan tujuan baik individu, kelompok, dan Inspektorat secara umum dapat dicapai. Inspektorat wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat dan diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan Inspektorat sekurang-kurangnya menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5) Pemantauan pengendalian intern.

Pemantauan adalah usaha berkelanjutan untuk menjamin bahwa setiap gerak dan langkah seluruh unsur di Inspektorat berjalan sesuai arah dan tujuan yang telah ditetapkan. Sistem pengendalian intern di Inspektorat adalah dinamis, berubah sesuai tuntutan kondisi. Keseluruhan proses harus dipantau dan dimodifikasi sesuai kebutuhan. Inspektorat wajib melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidu lainnya.

c. Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi. Oleh karenanya para pimpinan wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam rangka untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Menurut Arens (2008 : 370) mengemukakan bahwa manajemen dalam merancang sistem pengendalian intern memiliki tiga tujuan umum :

1. Reliabilitas pelaporan keuangan

Manajemen bertanggungjawab untuk menyiapkan laporan bagi para investor, kreditor, dan pemakai lainnya. Manajemen memikul baik tanggungjawab hukum maupun profesional untuk memastikan bahwa informasi telah disajikan secara wajar sesuai dengan persyaratan pelaporan keuangan seperti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Tujuan pengendalian internal yang efektif atas pelaporan keuangan adalah memenuhi tanggungjawab pelaporan keuangan tersebut.

2. Efisiensi dan efektivitas operasi

Pengendalian dalam perusahaan akan mendorong pemakai sumber daya secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran-sasaran

perusahaan. Tujuan yang penting dari pengendalian intern ini adalah memperoleh informasi keuangan dan non keuangan yang akurat tentang operasi perusahaan untuk keperluan pengambilan keputusan.

3. Ketaatan pada hukum dan peraturan

Section 404 dari undang-undang Serbanes-Oxly mengharuskan semua perusahaan publik mengeluarkan laporan tentang keefektifan pelaksanaan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Selain memenuhi ketentuan hukum, organisasi-organisasi publik, non publik, dan nirlaba diwajibkan mentaati berbagai peraturan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai sumber daya manusia ada di instansi pemerintah pernah dilakukan. Penelitian Dinata (2004) menemukan bukti empiris bahwa secara garis besar sumber daya manusia yang ada di Instansi Pemerintah Kota Palembang belum sepenuhnya dinyatakan siap atas berlakunya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia yang masih belum memadai. Kapasitas sumber daya manusia yang masih minim ini memiliki pengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Widinyaningrum (2010) yang berjudul Pengaruh SDM dan Pemanfaatan TI terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemda dengan variabel intervening

Pengendalian Intern Akuntansi menunjukkan bahwa SDM dan Pemanfaatan TI berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemda melalui pengendalian intern akuntansi, Pemanfaatan TI berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemda, sedangkan SDM tidak berpengaruh dimana penelitian ini studi empirisnya di Pemda SUBOSUKA WONO SRATEN.

Penelitian yang dilakukan oleh Indriasari,*et al.*(2008) pada Kota Palembang dan Ogan Hilir yang meneliti pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi(ketepatanwaktuan) pelaporan keuangan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi.

Kegiatan lokakarya eksplorasi pengembangan kapasitas Pemerintah daerah Kutai Kartanegara pada tahun 2003 (dalam Indriasari,*et al.*2008) berhasil mengidentifikasi permasalahan sumber daya manusia dalam tiga tingkatan yaitu tingkat sistem, lembaga, dan individu. Hasil perangkaian dari permasalahan tersebut menetapkan urutan prioritas penanganan yang pertama adalah penempatan pegawai kurang sesuai dengan bidang ilmu yang berdampak pada rendahnya pemahaman aparatur terhadap tugas dan fungsinya. Selain itu terkait dengan sumber daya manusia di satuan kerja di Indonesia. Sebuah tulisan di Media Indonesia(1:2006) menyebutkan bahwa dari 19.760 satuan kerja, hanya empat orang akuntannya.

Dari penelitian Harifan (2009) yang meneliti mengenai Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Padang. dari Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap Nilai Informasi (Keterpahaman) Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Padang.

Dari penelitian Muliani(2000) menghasilkan kesimpulan bahwa perkembangan teknologi informasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap bidang akuntansi manajemen. Kehadiran teknologi informasi memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, seperti mampu meringankan aktivitas bisnis yang kompleks serta menghasilkan informasi yang dapat dipercaya, relevan, tepat waktu, lengkap, dapat dipahami, dan teruji dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan manajemen. Oleh sebab itu peneliti juga menguji apakah penerapan teknologi informasi juga mempunyai dampak positif terhadap penciptaan nilai informasi pada manajemen pemerintahan, terutama dalam hal pelaporan keuangan pemerintah.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan keterkaitan antara variable yang akan diteliti berdasarkan batasan dan rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan kajian teori

yang telah dikemukakan di atas dapat dijelaskan bahwa untuk meningkatkan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, diperlukan kualitas sumber daya manusia yang memadai, adanya pengawasan terhadap keuangan daerah dan menerapkan sistem pengendalian intern pada pemerintah Kota Padang Panjang.

1. Hubungan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sebagai sebuah implementasi kebijakan publik dalam praktik, memerlukan kualitas sumber daya manusia yang memadai dari segi jumlah dan keahlian (kompetensi, pengalaman, serta informasi yang memadai), disamping pengembangan kapasitas organisasi. Sumber daya manusia yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan dalam menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Sumber daya manusia pengguna sistem dituntut untuk memiliki tingkat keahlian akuntansi yang memadai atau paling tidak memiliki kemauan untuk terus belajar dan mengasah kemampuan di bidang akuntansi. Disini kemampuan sumber daya manusia itu sendiri sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang bernilai (andal).

Apabila sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi tidak memiliki kualitas dan kapasitas yang disyaratkan, maka

akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi, dan akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi, kualitasnya menjadi buruk. Informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang kurang atau tidak memiliki nilai, diantaranya adalah keandalan. Selain itu pegawai yang memiliki pemahaman yang rendah terhadap tugas dan fungsinya, serta hambatan yang ditemukan dalam pengelolaan data juga akan berdampak pada penyajian laporan keuangan. Ketidakandalan penyajian laporan keuangan berarti bahwa laporan keuangan belum atau tidak memenuhi salah satu nilai informasi yang disyaratkan, yaitu keterandalan.

2. Hubungan Pengawasan Keuangan Daerah dengan Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah.

Sistem akan berjalan baik apabila ada pengawasan yang memastikan sistem berjalan sesuai dengan rencana, untuk mendukung kualitas laporan keuangan yang handal. Maka oleh sebab itu perlu adanya suatu pengawasan dalam pengelolaan anggaran daerah tersebut agar semua proses berjalan dengan baik sehingga dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang handal.

Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal diarahkan antara lain untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Salah satu fungsi pengawasan

adalah pengambilan tindakan korektif, yaitu apabila ditemukan adanya penyimpangan, kekeliruan, serta pemborosan dapat segera diperbaiki, sehingga informasi keuangan yang dihasilkan menjadi valid dan relevan. Salah satu komponen pengendalian intern yaitu aktivitas pengawasan yang berhadapan dengan penilaian berkala atau berkelanjutan dari mutu penampilan/prestasi pengendalian intern.

Pengawasan merupakan upaya untuk mengenali penyimpangan atau hambatan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Bila ternyata kemudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan, diharapkan akan dapat segera dideteksi atau diambil tindakan koreksi, sehingga informasi keuangan dapat segera digunakan oleh pemakai, dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat berjalan secara maksimal. Pengawasan keuangan pemerintah daerah juga menentukan kualitas laporan keuangan yang baik.

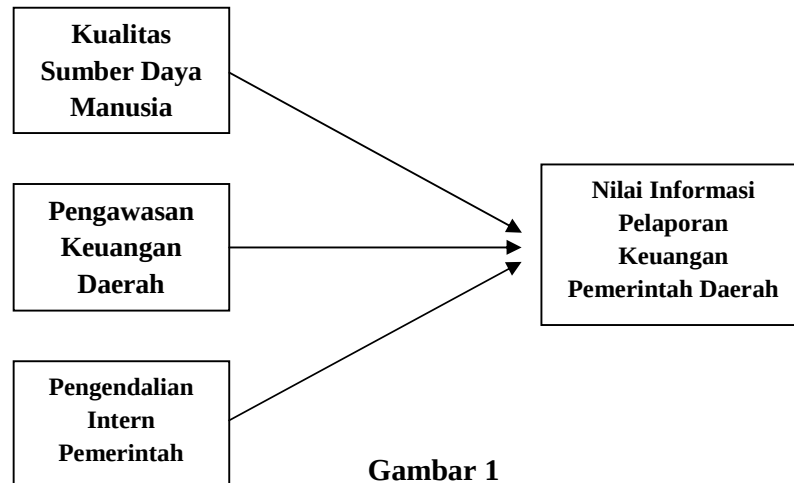
3. Hubungan Pengendalian Internal dengan Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah

Sistem pengendalian intern diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem pengendalian intern juga menentukan kualitas laporan keuangan yang baik. Sistem pengendalian intern terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan laporan keuangan. Penyimpangan dan kebocoran yang masih ditemukan di dalam laporan keuangan pemerintah menunjukkan bahwa

laporan keuangan tersebut belum memenuhi karakteristik/ nilai informasi. Dari sistem informasi yang ada diharapkan mampu memproses serta menghasilkan data keuangan dan non keuangan menjadi suatu informasi yang dapat digunakan (bernilai) untuk pengambilan keputusan yang mana sistem akuntansi sudah menjadi satu kesatuan dari proses akuntansi, mulai dari akuntansi keuangan, audit dan saat ini sampai pada sistem pengendalian.

Sistem akuntansi memerlukan pengendalian intern atau dengan kata lain informasi akuntansi berkaitan erat dengan pengendalian intern organisasi. Bila dikaitkan dengan penjelasan mengenai pengendalian intern akuntansi, maka penyebab ketidakandalan laporan keuangan tersebut merupakan masalah yang berhubungan dengan pengendalian intern akuntansi.

Hubungan antara kualitas sumber daya manusia, pengawasan keuangan, dan pengendalian intern pemerintah terhadap nilai pelaporan keuangan pemerintah dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1
Kerangka Konseptual Penelitian

D. Hipotesis

Berdasarkan Kerangka Konseptual yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat dibuat beberapa hipotesis terhadap permasalahan sebagai berikut :

- H1 : Kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah
- H2 : Pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah
- H3 : Pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh kualitas sumber daya manusia, pengawasan keuangan daerah dan system pengendalian intern pemerintah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan kualitas sumber daya manusia terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah.
2. Terdapat pengaruh yang signifikan pengawasan keuangan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah. Dimana semakin baik pengawasan keuangan, nilai informasi pelaporan keuangan daerah pun akan semakin baik.
3. Terdapat pengaruh yang signifikan pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah. Dimana semakin baik pengendalian intern, nilai informasi pelaporan keuangan daerah pun akan semakin baik.

B. Keterbatasan

Sekalipun penelitian ini telah dirancang dengan baik, namun hasil penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Berikut beberapa keterbatasan yang kemungkinan mengganggu hasil penelitian ini :

- a. Penelitian ini menggunakan metode survey tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan, sehingga kemungkinan mempengaruhi validitas hasil. Jawaban responden belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan akan berbeda jika data diperoleh dengan wawancara..
- b. Penyebaran kuesioner pada beberapa SKPD masih memiliki kendala dalam prosedur perizinan dan pengisian kuesioner. Hal tersebut menyebabkan data yang diolah kurang optimal, untuk penelitian selanjutnya diharapkan responden yang dituju dapat melakukan pengisian kuesioner yang disebarkan.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diberikan beberapa saran berikut :

1. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh inspektorat dan system pengendalian intern di SKPD Kota Padang Panjang telah baik dilakukan, tapi masih ada beberapahal yang belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna sehingga hal ini akan berdampak pada nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah sebaiknya melakukan *upgrade* terhadap system akuntansi pelaporan keuangan daerah sehingga tidak ada hambatan dalam melakukan pencatatan akuntansi secara *online*. Dengan begitu maka akan mempermudah dalam penyajian laporan keuangan yang bermutu. Sedangkan pada kualitas sumber daya manusia belum memenuhi

standar yang ada. Pemerintah daerah sebaiknya mulai untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama dalam bidang akuntansi dan menempatkan pegawai sesuai dengan kualifikasi dan kemampuan yang dimiliki. Mengadakan pelatihan pegawai untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaporan keuangan.

2. Penelitian ini masih terbatas pada Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengawasan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perubahan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah.
3. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, yaitu pada metode penelitian yang dipakai. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan berbagai macam metode, seperti wawancara langsung, metode survey lapangan, dll.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimbudiono, Ria Sandra & Fidelis Arastyo Andono. 2004. "Kesiapan Sumber Daya Manusia Sub Bagian Akuntansi Pemerintah Daerah (XYZ) dan Kaitannya Dengan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kepada Masyarakat: Renungan Bagi Akuntan Pendidik". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*.
- Anggraini, Devi. 2002. "Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah". Padang: *Skripsi* Program S1, Universitas Negeri Padang (Tidak Dipublikasikan)
- Arens, Alvin A, Randal S Elder & Mark S Beasley. 2008. *Auditing & Pelayanan Verifikasi Pendekatan Terpadu*. Jakarta: Erlangga.
- Arfianti, Dita. 2011. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD di Kabupaten Batang." *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2006. *Konsep Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*.
- Dinata, Anton Mulhar. 2004. "Tinjauan Atas Kesiapan SDM pada Instansi Pemerintah Kota Palembang dalam Penerapan Akuntansi Daerah Menuju Terciptanya Good Governance di Era Otonomi Daerah." *Skripsi*, Universitas Sriwijaya, Indralaya.
- Fikri, Miftahul. 2011. "Pengaruh SIKD dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Kota Padang." *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik. 2006. *Standar Akuntansi Pemerintahan: Telaah Kritis PP Nomor 24 Tahun 2004*. BPFE, Yogyakarta
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Harifan, Handriko. 2009. "Pengaruh Kapasitas Sumber daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah, Padang." *Skripsi* Program S1, Universitas Negeri Padang (Tidak Dipublikasikan)
- Indriasari, Desi. 2008. "Pengaruh Kapasitas sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah, " *Simposium Nasional Akuntansi XI*. Pontianak

- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Pertama*. Yogyakarta :Penerbit Andi.
- Mulyadi. 1997. *Akuntansi Manajemen :Konsep, Manfaat, dan Terakayasa*. Yogyakarta: STIE YKPN
- Media Indonesia.9 Desember 2006. Sistem Akuntansi Pemerintah Lemah
- Pemerintah Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- , Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- , PeraturanPemerintahNomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah.
- ,Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2009. “Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi :Perekayasa Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta. BPFE
- Sugijanto.2002. Peranan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Implikasi UU No. 22/25 Tahun 1999.*Lintasan Ekonomi*.
- Soetanto. 2007. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Akuntansi pada *Implementasi basis data Program Financial Accounting and Monitoring System (PFAMS)*.

- Tim GTZ-Support for Decentralization Measures/P4D.Mei, 2005. Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Jilid II: Sumber Daya Manusia Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah.
- Triuwono, Iwan & Roekhudin. 2000. Konsistensi Praktik Sistem Pengendalian Intern dan Akuntabilitas pada Lazis (Studi Kasus di Lazis X Jakarta). *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*.
- Tuasikal, Askam. 2007. “PengaruhPengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Kabupatendan Kota di Propinsi Maluku.” *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. Vol. 10 No. 1 Hal. 66-82
- Wahana Komputer. 2003. *Panduan Aplikatif Sistem Akuntansi Online Berbasis Komputer*. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Wahyono, Teguh. 2004. *Sistem Informasi Akuntansi: Analisa ,Desain, dan Pemograman Komputer*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Widjajanto, Nugroho. 2001. *Sistem Informasi Akuntansi* .Jakarta :Erlangga.
- Warsoko, Soesanto. 2007. “ Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Akuntansi Pada Implementasi Basis Data PFAMS.” Padang: *Jurnal FE Unand*. Volume 11. No.4
- Yani,Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Yusuf, Amir Abadi. 1997. *Auditing, Pendekatan Terpadu, edisi revisi 1996*, (Arens dan Loebbeck). Jakarta :Salemba Empat.
- Zetra, Aidinil. 2009. Strategi Pengembangan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.